

**LAPORAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP  
PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN APRIL  
NOMOR: LAP-04/BPP/PPS/V/2025**



## KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Setelah 20 tahun berjalan, Pemerintah Pusat melanjutkan penyaluran Dana Otsus dengan memperkuat payung hukumnya melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus, melalui pembentukan badan khusus, yaitu Badan Pengarah Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pembentukan BPP bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh Dana Otsus Papua. Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dengan fokus pada penggunaan Dana Otsus secara efektif dan efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat yaitu kompleksitas koordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPP, dengan fokus pada memperkuat koordinasi, memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua, serta menjembatani pemahaman dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Otsus. Dalam arahan presiden pada 11 Maret 2020 dikatakan bahwa “Perlunya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, dan desain baru agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Selanjutnya dalam 5 kebijakan percepatan pembangunan Papua yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yaitu penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan tata Kelola, penguatan partisipasi & sinergi pelaku dan FOKUS pada kemanfaatan bagi OAP.

Berdasarkan misi RIPP 2022-2024 yaitu Memberikan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju “Papua Cerdas”, dengan sasaran Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dimensi pembangunan yang terdiri atas Fasilitas pendidikan yang berkualitas, Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif, Distribusi tenaga pendidik yang merata, dan Afirmasi

pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **2.1 Maksud**

Rapat Kerja ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi strategis antara Pemerintah Daerah se-Papua Raya dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan dan optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, integrasi program, serta penguatan peran dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

### **2.2 Tujuan**

Tujuan dari Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya, adalah :

1. Menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan penggunaan Dana Otsus di masing-masing daerah di Papua Raya.
3. Merumuskan strategi percepatan pembangunan yang berbasis potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan prinsip keadilan sosial.
4. Mengidentifikasi kendala, tantangan, serta merancang solusi bersama untuk efektivitas pelaksanaan Otsus sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan presiden.
5. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen antar pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua.
6. Menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) bersama untuk implementasi program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat adat.

## **3. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

#### **4. Ruang Lingkup Kegiatan**

Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya telah dilaksanakan pada Hari Selasa, 15 April 2025 yang berlokasi pada Propinsi Papua Tengah. Ruang lingkup rapat kerja mencakup :

- 1) **Sinkronisasi Program dan Kegiatan**  
Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus.
- 2) **Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus**  
Pembahasan capaian, tantangan, dan kendala implementasi program Otsus di seluruh wilayah Papua Raya.
- 3) **Perumusan Strategi Percepatan Pembangunan**  
Penyusunan strategi berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat Papua untuk mempercepat kesejahteraan.
- 4) **Penguatan Tata Kelola Dana Otsus**  
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Dana Otsus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah**  
Diskusi tentang penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan Otsus.
- 6) **Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lokal**  
Perumusan program berbasis pemberdayaan masyarakat asli Papua, penghormatan hak-hak adat, dan pelibatan komunitas lokal dalam pembangunan.
- 7) **Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**  
Penetapan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret sebagai hasil akhir rapat kerja untuk implementasi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi.

## B. Ringkasan Kegiatan

### 1. MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA SE-PAPUA RAYA DENGAN TEMA “KOLABORASI PERCEPATAN MENUJU PAPUA SEJAHTERA”

Berdasarkan undangan Gubernur Papua Tengah nomor 100.2.1.3/364/SET tanggal 9 April 2025 (<https://shorturl.at/cfhbX>) dan surat tugas nomor ST-37/SETBPP/JYP/2025 tanggal 11 April 2025 (<https://shorturl.at/HnQYY>). Sesuai dengan uraian kegiatan pada **Error! Reference source not found.** di atas, diperoleh hasil dari pertemuan rapat kerja, sebagai berikut.

#### a. Susunan Acara Pertemuan Rapat Kerja Pada Aula Kantor Gubernur Papua Tengah

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan-sambutan
- 3) Pemaparan Materi oleh Pimpinan Daerah 6 DOB Papua
- 4) Diskusi dan tanya Jawab
- 5) Pemberian Cendera Mata Khas Papua Tengah kepada Pimpinan Daerah 6 DOB
- 6) Photo Bersama
- 7) Penutup

#### b. Sambutan

##### 1) Sambutan Gubernur Papua Tengah : Meki Fritz Nawipa

- Apresiasi yang luar biasa atas terjalannya pertemuan Rapat Kerja ini dan hal ini baru pertama kali dilaksanakan di Papua Tengah, karena hari ini Papua ditentukan oleh kita semua.
- Bagaimana merumuskan agar rakyat bisa sejahtera, bagaimana minimize dan menyelesaikan masalah di negeri ini, dan bagaimana orang Papua dapat mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat.
- Populasi Papua Tengah ±1.400.000 Penduduk, 8 Kabupaten, 131 distrik, 336 Kelurahan, 1215 Kampung, dengan kondisi geografis yang beragam dan tantangan aksesibilitas.
- Raker ini menjadi momen penting untuk menyatukan arah dan langkah, tidak hanya bertukar pandangan, tetapi juga menyusun program-program strategis dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing
- Hasil dari pertemuan ini akan dirangkum menjadi satu kesimpulan bersama yang rencana akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai suara kolektif dari Tanah Papua.
- Diharapkan Forum ini dijadikan ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam kebijakan otonomi khusus, dan semua mempunyai tanggungjawab yang sama yaitu untuk memastikan Otonomi Khusus benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di Tanah Papua
- Link Materi Pembuka : <https://linkcuts.org/imtiza2m>

##### 2) Sambutan Anggota BPP-Papua Tengah : Irjen Pol (Purn) Drs. Petrus Waine, SH.,M.Hum

- Daerah Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, ada dana Otsus ada Badan-badan Khusus, ada badan yang menyelenggarakan yang mengelola Dana Otonomi Khusus.
  - Kita berada dalam situasi-situasi khusus, dan dihadapkan pada peran kita masing-masing.
  - Keberadaan BP3OKP berdasarkan UU No.2 Tahun 2021 Pasal 68 a. yang menyebutkan Badan-Badan Khusus, diantaranya BP3OKP.
  - Badan-badan khusus sudah di atur dalam aturan masing-masing, untuk melaksanakan tugasnya masing-masing
  - Tusi BP3OKP melaksanakan fungsi SHEK, berdasarkan PP 106 tahun 2021, terkait kewenangan-kewenangan khusus, dengan posisi BP3OKP diatur pada pasal 85-91
  - Berdasarkan PP 107 tahun 2021, terkait Pada pasal 50 dan 51, dan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kabupaten Dikoordinasikan dengan BP3OKP
  - Tugas dan tanggungjawab BP3OKP sebagai badan penentu pengelola dana otonomi khusus, pemda prov dan kabupaten, bahkan kementerian dan lembaga wajib melaporkan hasil kegiatan, atau hasil laporan akhir tahun setiap bulan maret setiap tahun.
  - Dalam laporan tahunan wajib disampaikan kepada BP3OKP, tahun lalu akan ditolerir namun di tahun 2025 ini mohon kerjasamanya. Perlu dicatat bahwa pengawasan berada di BP3OKP yang berkoordinasi dengan BPK. KPK dll. Apabila ada penyimpangan maka tidak akan ditolerir.
- 3) Diskusi kolaborasi percepatan program prioritas menuju Papua Sejahtera (Moderator Dr.Ir. Agus Sumulle : Akademis Pemerhati Kesehatan dan Pendidikan di Tanah Papua). Mengarahkan pemaparan materi dari masing-masing DOB.
- Gubernur Papua Tengah : <https://shorturl.at/FTffn>
    - Kolaborasi yang diharapkan seperti apa?
    - Arah kebijakan Otsus Baru di Papua Tengah ; kekhususan secara kelembagaan (lihat materi Papteng)
    - Diskusi tentang bagaimana mengusulkan pemekaran untuk percepatan pembangunan.
    - Papua Tengah yang akan dilakukan meletakkan pondasi Papua Tengah 50-100 tahun ke depan, untuk pendidikan membangun pendidikan berpola asrama
    - Tanggal 17 Papua Tengah akan mengundang 19 lembaga pendidikan di Indonesia tentang apa yang akan mereka buat untuk Papua Tengah.
    - Rencana Papua Tengah akan membangun Universitas Negeri di Nabire.
    - Fokus menyekolahkan OAP ke sekolah-sekolah kedinasan, agar segera terserap dalam dunia kerja.

- Harapan ke depannya dinas-dinas pendidikan dapat bertemu, dan perlunya ada lembaga bimbingan belajar. Kelas 2 dan 3 di kirim ke Jawa dan kelas bimbingan belajar tetap ada, agar kualitas lulusan OAP dapat berkompetisi dalam proses seleksi sekolah kedinasan (AKMIL, AKPOL, IPDN dll) Lulusan OAP mampu lulus secara kompetitif tanpa adanya prioritas khusus/afirmasi.
- Untuk pendidikan gratis semua Gubernur 6 DOB, saat ini lagi mencari Format Pendidikan Gratis yang akan dilaksanakan seperti apa?. (Apakah berikan beasiswa, mempersiapkan guru kontrak). Untuk Papua Tengah terkait dengan hal ini akan dilaksanakan pertemuan pada tgl 17 April 2025.
- Untuk sektor Ekonomi, sudah direncanakan untuk membuka 1 tambang baru di Nabire. Untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait adanya ilegal tambang yang selama ini terjadi. Dan dalam pembukaan tambang akan adanya pembagian yang logis antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat di Papua Tengah.
- Merger dalam BUMD terkait pembukaan lahan tambang antar Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat Daya agar negeri ini ada penghasilan dan akan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan Papua Raya.
- Cold Storage, adanya kerjasama kolaborasi agar hasil laut dapat dikelola dengan baik.
- Di Pomako ada  $\pm 80.000$  Ha, dan butuh  $\pm 20.000$  Ha lagi, rencana akan dibuat Carbon Trade (CT), karena CT uangnya lebih banyak dibandingkan tambang. Lanjutkan dengan Format.
- Propinsi baru diharapkan dapat kolaborasi membuat 5 atau 4 program yang sinergi dan besar guna keberlanjutan 50-100 tahun.
- Penawaran PT terkait kelanjutan pembangunan Kantor Gubernur selain Papua Selatan.
- Rencana pembicaraan khusus terkait dengan infrastruktur Kantor Gubernur 4 Propinsi DOB, kedua dana otsus dimana Undang-undangnya terpisah dengan UU keuangan negara, jadi tidak bisa keputusan presiden memotong dana otsus sama dengan DAU dan DAK.
- Pada bidang kesehatan, Papua Tengah akan membangun klinik bersalin dan Rumah Sakit Bayi Tabung Gratis.
- Rencana dari 6 DOB membuat program yang besar untuk proyeksi 50-100 tahun ke depan
- Strategi pengelolaan MBG yang akan di atur secara strategis agar tidak menimbulkan penolakan-penolakan di tengah-tengah masyarakat.
- Perpres 33 tahun 2020, kita punya harga diri dan kita tidak bisa disamakan dengan daerah Jawa. Khusus untuk tanah Papua Presiden perlu melakukan

evaluasi, karena bisa memberikan peluang dan potensi Korupsi yang lebih besar.

- Desk Otsus di Tanah Papua, agar tim ini melakukan kajian bukan hanya Otsus saja tetapi UU nasional sehingga kajian tersebut diberikan kepada Pemda untuk penerapannya tidak salah persepsi. Selain UU Otsus dan UU Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga perlunya desk otsus Papua yang beralamat di Jayapura atau manokwari akan menjadi pedoman bagi 6 DOB, agar meminimalisir kesalahan penerapan kebijakan.
- Secara lengkap terkait materi yang disampaikan oleh Gubernur Papua tengah dapat dilihat pada link <https://linkcuts.org/g0eo9onb> dan pada poin C. Pemaparan Materi
- Modertor : Apa yang kita ingin capai saat ini, dan kita wajib mengetahui wajah dan identitas kita saat ini, dan inilah yang akan kita ubah, yaitu wajah kita menjadi lebih baik. Baiknya dimulai dari kampung, ada 7548 kampung diseluruh tanah Papua. Artinya dibutuhkan 7548 bidan dan posyandu untuk melayani masyarakat. Ada 799 Distrik, dan wajib diperkuat pada pemerintahan distrik, sehingga rencana pelayanan dapat terjangkau. Penduduk Papua ±5,4 juta. IPM tidak yang melebihi rasio nasional. Lihat konsentrasi pada OAP. Kondisi anak-anak OAP, yang berusia sekolah tetapi tidak sekolah, hampir 700.000 per tahun 2023.
- Sekda Papua Barat mewakili Gubernur Papua Barat  
: <https://linkcuts.org/f5ezy4bp>
- Asisten Mewakili Gubernur Papua  
: <https://shorturl.at/rZIAq>
- Wakil Gubernur Papua Barat Daya  
: <https://shorturl.at/MyifZ>
- Staf Ahli mewakili Gubernur Papua Selatan  
: <https://shorturl.at/xIDEs>
- Sekda mewakili Gubernur Papua Pegunungan  
: <https://shorturl.at/QJGfX>
- Anggota BP3OKP/BPP di Wakili oleh Anggota BPP Papua Barat Daya  
: <https://shorturl.at/Fwkve>

### **Tindak Lanjut Dan Rekomendasi Hasil Kegiatan**

Rapat kerja yang telah dilaksanakan dan sesuai pemaparan program, diskusi dan masukan bersama, diperoleh saran strategis untuk keberlanjutan program dalam rangka Otsus Papua Raya, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dokumen rencana aksi daerah berdasarkan kesepakatan rapat, berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang RIPP.
- 2) Penunjukan koordinator daerah untuk setiap program prioritas.
- 3) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memantau implementasi program.

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam saran strategis untuk keberlanjutan program, diperoleh

rekomendasi secara garis besar diantaranya :

- 1) Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bappeda, dan instansi vertikal (K/L dan Presiden).
- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan dan evaluasi program.
- 4) Membuat sistem *reward and punishment* untuk percepatan realisasi program.

Secara rinci **draft rekomendasi** yang diusulkan oleh BP3OKP Papua Raya, dapat dilihat pada link berikut : <https://shorturl.at/rF3MA>.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pemerintah Daerah Dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya Dengan Tema “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera”, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Komitmen dan kesepakatan bersama melakukan proses pembangunan melalui otonomi khusus dengan transparan, jujur dan adil sesuai dengan amanah UU No. 02 Tahun 2021
- 2) Tindaklanjut kesepakatan bersama akan disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia

## **2. MENGHADIRI SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NO.1 TAHUN 2025 DAN LOKAKARYA PELATIHAN PENGGUNAAN SIPPP DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS DI PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, DAN PAPUA PEGUNUNGAN**

Maksud kunjungan kerja, rapat, dan audensi dari Anggota BPP, kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat BPP PPS, bersama Pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan sekolah-sekolah pusat pendidikan peserta didik Orang Asli Papua pada Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, adalah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. SHEK, Evaluasi pelaksanaan penggunaan dan penyerapan dana Otonomi Khusus Tahun 2024
- b. SHEK, Sosialisasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)
- c. Koordinasi dan sinkronisasi rencana program kerja Daerah Tahun 2025 agar selaras dengan RIPPP
- d. SHEK, Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta percepatan pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang Pendidikan dari PAUD – SD melalui Pendidikan guru.
- e. SHEK, Peninjauan tempat pelayanan Kesehatan dan sekolah di wilayah Kabupaten Asmat

Tujuan dari kunjungan kerja, rapat, dan audensi antara Anggota BPP, kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat BPP PPS pada Pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan sekolah-sekolah pusat pendidikan peserta didik Orang Asli Papua pada Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan adalah untuk Memperoleh data dan informasi tentang proses pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun yang telah dilalui yaitu tahun 2024 dan rencana kerja yang telah disusun untuk pelaksanaan proses pembangunan tahun berjalan yaitu tahun 2025.

## Hasil Kegiatan :

Hasil sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2025 dan Lokakarya Pelatihan Penggunaan SIPPP dalam Pelaksanaan Musrenbang Otsus di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, terurai sebagai berikut :

### a. Sambutan

- 1) Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Papua
- 2) Sambutan Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas

### b. Pemaparan Materi

- 1) Pemaparan Materi Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah. Adapun materi yang disampaikan tersusun sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi Permen Ppn/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2025 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua : <https://shorturl.at/MC8Ti>
- (2) Urgensi Musrenbang Otsus Dalam Penyusunan RAP PENERIMAAN Dalam Rangka Otsus : <https://shorturl.at/771R3>

- 2) Pemaparan Materi oleh Albert Yoku, Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua

- (1) Peran BP3OKP dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Otsus di Papua Barat Daya : <https://shorturl.at/hPQb7>
- (2) Peran Penting BPP dalam mendukung pelaksanaan Musrenbang OTSUS : <https://shorturl.at/mMSmF>

### c. Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dalam mendukung Pelaksanaan Musrenbang Otsus, serta Simulasi Penginputan Data ke Aplikasi SIPPP

Pelatihan penggunaan SIPPP dilakukan agar semua pemangku kepentingan sebagai pelaku pembangunan khususnya di Papua dapat mengetahui, memahami dan mengoperasikan aplikasi tersebut sesuai dengan peruntukannya secara maksimal. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut secara berurutan sebagai berikut :

- 1) Petunjuk Teknis Penggunaan SIPPP : <https://shorturl.at/0YsjH>
- 2) Akun Demo SIPPP : <https://shorturl.at/vkoom>

## Rekomendasi Dan Tindaklanjut Hasil Kegiatan

Rekomendasi dan tindaklanjut hasil kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2025 dan Lokakarya Pelatihan Penggunaan SIPPP:

- 1) Rekomendasi BP3OKP  
Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Sinergi dalam Rangka SHEK
- 2) Pemerintah Daerah  
Menginput data rancangan, pelaksanaan dan hasil proses pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua

## Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi Permen Bapenas dan pelatihan SIPPP, adalah :

1. Peraturan menteri merupakan salah satu pedoman pelaksanaan pembangunan Otsus Papua
2. Pentingnya semua unsur pelaku pembangunan saling bersinergi
3. SIPPP sebagai tools/device untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Otsus Papua sesuai dengan pencapaian tujuannya.

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Bandara Douw Aturure Nabire



Dokumentasi Foto bersama di depan Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin 14 April 2025



Dokumentasi Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Bersama Pemerintah Daerah dan BPP Se Papua Raya Pada Aula Kantor Gubernur Papua Tengah

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Distrik	Kampung/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (2021)	Persentase GDP (%) Basis Sensus Penduduk 2019 atau Laporan Standar Outsourcing
Papua	9	115	1,032	1.008.086	70,60
Papua Barat	7	86	969	551.251	50,41
Papua Tengah	8	131	1,208	1.390.850	85,23
Papua Selatan	4	83	687	513.617	70,59
Papua	8	252	2,634	1.390.861	97,66
Pegunungan Papua Barat Daya	6	132	1,018	605.049	39,92
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>799</b>	<b>7,548</b>	<b>5.459.714</b>	<b>69</b>

(40 Kab., 2 Kota)

Dokumentasi Materi Rapat Kerja Bersama Pemerintah Daerah dan BPP Se Papua Raya



Dokumentasi Photo Bersama Anggota BPP Se Papua Raya



Dokumentasi Photo Bersama Anggota BPP, Pokja Papua Sehat BPP-PPS pada akhir kegiatan Rapat Kerja



Dokumentasi Malam Ramah Tamah, selasa 15 April 2025 pada Aula Kantor Gubernur Papua Tengah



Dokumentasi Materi Kegiatan Sosialisasi Oleh BAPPENAS

## **KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Badan Pengarah Papua (BPP) selanjutnya disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) , berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan yang ada di Papua, yang memiliki tugas melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Kordinasi (SHEK) pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. BP3OKP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus dan dana lainnya yang di berikan ke Papua digunakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi pembangunan Papua Sehat, Papus Cerdas dan Papua Produktif.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua menjadi lebih terarah dan jelas karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua tahun 2021-2041 yang membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. RIPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua Selatan yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan. dapat tercapai Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua . Program ini memilki tujuan yaitu menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar dan menjamin cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan membangun infrastruktur serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan kesehatan.

#### **2. Tujuan Kegiatan**

Konsultasi dan Koordinasi dengan BPKP Provinsi Papua Terkait Hasil Pelaksanaan Program Perencanaan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 di wilayah Pemerintah Papua Selatan.

#### **3. Ruang Lingkup**

Program perencanaan dan Penggunaan Anggaran tahun 2024 di wilayah Pemerintah Papua Selatan tahun 2024.

### **B. Hasil Kegiatan yang dilaksanakan dibulan April**

#### **1. AUDIENSI POKJA PAPUA SEHAT BERSAMA DENGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA SELATAN**

Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025, Adapun hasil diskusi yang diperoleh sebagai berikut :

- Pekan Olahraga Pelajar (POP) Provinsi Papua Selatan tahun 2024 menghabiskan dana 4,5 M dengan pembiayaan 4 kabupaten dan provinsi dari sumber dana hibah khusus yang ada di Provinsi Papua Selatan. Target untuk mPOP adalah untuk ke POP nasional dengan ruang lingkungannya seluruh sekolah dari 4 kabupaten yang bersedia ikut serta dan untuk tahun 2024 berjalan dengan baik
- POP tahun 2026 di kabupaten Asmat sebagai tuan rumah untuk mendorong kabupaten Asmat harus siap untuk melenggarakan kegiatan ini sesuai dengan venue yang tersedia termasuk termotivasi untuk membangun kelengkapan venue yang ada untuk kegiatan dan membangun motivasi dari pelajar yang ada di Asmat
- Dengan adanya POP ini bisa membangun kepercayaan diri dari anak-anak kita
- POP ini dilaksanakan bukan hanya di ibukota provinsi tapi juga di 4 kabupaten di provinsi Papua Selatan dengan pembiayaan di subsidi dari Provinsi kepada kabupaten
- Manfaat diadakan POP di setiap daerah adalah terdapat kolaborasi olahraga dan pariwisata, jika kegiatan POP dilaksanakan di Asmat secara otomatis akan mendatangkan orang dari luar Asmat berkunjung ke Asmat maka hal ini akan berdampak bagi pariwisata di Asmat
- Untuk kegiatan POP di Asmat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi akan membantu subsidi dana nya sehingga tidak akan memberatkan kabupaten Asmat
- Rencana pembangunan lapangan multifungsi di kabupaten Asmat sedang membangun komunikasi di kementerian
- Olahraga masyarakat sedang dikembangkan dimana sedang direncanakan untuk ada waktu khusus di setiap hari Jumat pagi 1 jam untuk bisa berolahraga, sedang dipersiapkan perdanya

## **2. AUDIENSI BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN DAN PROVINSI PAPUA BERSAMA DENGAN MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH**

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025 bertempat di Kantor BPP Provinsi Papua, Jayapura. Seluruh pokja yang hadir mendengar keluhan kesah yang di hadapi oleh perwakilan mahasiswa

- Wacana DO namun sudah di respon dekan bahwa tidak ada wacana DO
- Kebijakan fakultas untuk mahasiswa yang tidak lulus 2x ujian stase diberikan ujian komisi namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan ujian komisi (ujian tatap muka dengan dosen penilai). Sehingga dibutuhkan program khusus
- Masalah Renim (Pembaharuan NIM karena sudah lewat masa studinya). Biaya 5 juta per mahasiswa. Hal yang menjadi prioritas saat ini karena sudah mendesak dimana batas waktu pembayaran adalah tanggal 18 April 2025

- Jika terdapat tunggakan UKT tetap harus dibayarkan. Biaya UKT sampai selesai studi sebesar 20 juta. Biaya UKMPPD 1,2 juta
- Waktu persiapan UKMPPD yang sudah sangat singkat, yaitu rencana pembukaan pendaftaran tanggal 28 Februari dan UKMPPD kemungkinan di belasan Mei, dengan terkendala biaya pendaftaran, biaya Progsus, Renim dan tunggakan UKT.
- Bantuan biaya hidup selain biaya studi
- Jika tidak ada bimbingan dari fakultas maka di usulkan untuk ada bimbingan dari pihak swasta
- Mahasiswa Papua Selatan sudah mengajukan 6x permohonan bantuan studi kepada kepala Dinas Kesehatan, Wakil Gubernur, Bpk Gubernur dan sudah ketemu dengan wakil ketua II DPR PPS dengan team tapi belum ada tindak lanjut
- Terdapat pungli di fakultas seperti pengumpulan biaya UKT oleh oknum di fakultas yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan dan terdapat bukti, namanya pak Heri dan pak Fani bagian data. Pembayaran SPP yang tidak sah yaitu tidak menggunakan VA, tidak ada kwitansi.
- KRS on line baru diaktifkan di tahun 2025 sedangkan sistem yang lama mahasiswa selesai stase barulah nilai di kumpulkan sehingga belum terdaftar
- Ada mahasiswa yang memiliki ijazah S.Ked tapi di sistem pddikti terdaftar sebagai mahasiswa yang sudah dikeluarkan dari semester 3, pendidikan profesi non aktif sementara yang bersangkutan rutin mengisi data di pddikti setiap semester.
- Waktu akademik panjang yang tidak sesuai jadwal resmi
- Permasalahan mahasiswa pada angkatan tahun 2006-2016 dengan total mahasiswa 134 orang namun telah dikonfirmasi sudah meninggal 4 orang, 30 orang putus studi sisanya permasalahan Renim, UKT dan UKMPPD
- Mahasiswa perwakilan Papua Selatan sudah bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan namun di arahkan untuk kembali kebagian kesra masing masing kabupaten, dan untuk kabupaten Mappi berpatokan pada peraturan bupati bahwa bantuan biaya pendidikan hanya untuk 2 tahun, untuk supaya ada kebijakan disarankan untuk menghadap ke Bupati.

Perwakilan Mahasiswa FK UNCEN yang Hadir :

- Kanisius Mahuze, Kabupaten Merauke PPS, Angk 2011, UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter)
- Nelson Aremu, Kabupaten Mappi PPS, Angk 2013, UKMPPD
- Rafel Morin, Kabupaten Biak Numfor PP, Angk 2010, Terkendala biaya
- Viliana Okta Krisima, Kota Jayapura, Angk 2006, UKMPPD
- Lufi Wenda, Kabupaten Lany Jaya PPg, Angk 2012, UKMPPD
- Sofphia Lanora Paa, Kabupaten Sorong PBD, Angk 2011, UKMPPD
- Ferdinan Kapisa, Kabupaten Manokwari PB, Angk 2011, sisa 2 Stase

- Satian Paradawai, Kabupaten Manokwari PB, Angk 2012.
- Lois K Putra, Kabupaten Nabire PPT, Angk 2013, belum bisa yudisium
- Legi Keya, Kabupaten Nabire PPT, Angk 2013, belum UKMPPD
- Kristifani, Provinsi Papua, Angk 2012, , belum UKMPPD
- Karla Sanadi, Provinsi Papua, Angk 2012, ujian 1 stase
- Soleman, Provinsi Papua Tengah, Angk 2010, Renim
- Fransiska Isir, Provinsi Papua Barat, Angk 2010, sisa 1 stase
- Matius, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Angk 2013, Biaya

### **3. AUDIENSI BP3OKP BERSAMA DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH, JAYAPURA**

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 merupakan tindak lanjut pertemuan dengan mahasiswa di tanggal 16 Mei 2025 bertempat di Kantor BPP Provinsi Papua, Jayapura. Tujuan audiensi ini untuk mendengar langsung tanggapan Dosen FK Uncen terkait keluhan kesah mahasiswanya:

Dekan FK UNCEN :

- Sudah dimulai sejak 10 bulan yang lalu program khusus untuk mahasiswa yang bermasalah sudah berada di batas masa studi karena Ada yang sudah 30 kali UKMPPD tapi tidak lulus, sebenarnya mereka sudah mendapat kemudahan afirmasi untuk pola ujian yang lebih sederhana namun sesuai standar nasional, bulan desember tahun 2024 hanya 8 orang yang lulus sedangkan bulan februari 2025 ada 43 orang, dimana OAP 36 orang.
- Setelah mahasiswa berproses di coass, mahasiswa tidak membayar UKT, Fakultas yang mensubsidi biaya pendidikan mahasiswa yang coass sehingga fakultas tidak bisa membangun sarana dan prasaran yang lebih memadai karena dana nya banyak terpakai di subsidi kepada mahasiswa.
- Tidak ada biaya UKT pada mahasiswa coass karena belum ada SK Rektor da VA terkait biaya UKT mahasiswa coass dan Fakultas tidak berani memungut biaya UKT karena menerapkan zona integritas
- Renim sementara berproses dengan biaya berdasarkan SK Rektor. Proses pengajuan renim yaitu pengusulan nama nama mahasiswa dari fakultas ke rektorat kemudian dari rektorat ke pusat. Fakultas berusaha bantu bicara ke pusat supaya mahasiswa periode Mei ini diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ujian meskipun Renimnya masih berproses. Sempat ada kekuatiran karena ada 24 mahasiswa yang tidak bisa masuk dalam sistem. Namun ada informasi pagi ini sudah ada kebijakan bahwa anak anak ini sudah bisa mengikuti ujian
- Ujian try out untuk UKMPPD di laksanakan untuk persiapan bimbingan untuk UKMPPD dengan biaya yang di bayar ke pusat
- Untuk pembayaran UKT harus Renimnya keluar barulah mahasiswa membayar biaya UKT
- SLIDE FK UNCEN (Lampiran)

- Uji Kompetensi mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) bertujuan memastikan setiap profesi dokter yang lulus dari program profesi dokter memiliki standar kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian jika mahasiswa Uncen lulus UKMPPD yang diselenggarakan secara nasional ini maka standar mahasiswa Uncen sama dengan mahasiswa UI karena soal dan metodenya sama. Sehingga apabila FK Uncen menghasilkan dokter umum maka hal itu tidak akan diragukan lagi kualitasnya
- Hasil UKMPPD akan berpengaruh pada standar akreditasi FK Uncen maka UKMPPD ini akan sangat penting artinya pada keberadaan FK Uncen
- Sejak bulan Agustus 2024 FK Uncen sudah mendata secara personal dengan mengirim google form pada masing masing mahasiswa dengan permasalahan yang ditemui yaitu : masalah keluarga dan pribadi, tersendat di masalah profesi , UKT. Sebenarnya kami sudah punya data tapi tidak bisa kami sampaikan secara terbuka. Ada yang harus diberikan NIM yang baru
- Permasalahan NIM adalah karena mahasiswa sudah melakukan perkuliahan bahkan putaran profesi tapi tidak membayar UKT
- Terdapat 107 mahasiswa retaker di FK Uncen, ini lebih sedikit dari salah satu FK di Sumut dimana retakernya ada 237 mahasiswa, bahkan Unhas juga terdapat 197 retaker.
- Sudah ada penyelesaian dari tahun 2024 , yaitu progsus berhasil dari 8 orang menjadi 45, mekanisme progsus adalah mereka di uji dari 3-4 dosen dengan 5 topik yang dipelajari, kemudian di undi kasus mana yang akan di bahas dalam ujian dan harus menjawab didepan dosen sesuai dengan pertanyaan yang sudah di susun. Dan dari 45 orang ada yang first retaker yang lulus, sehingga bisa dilihat bahwa progsus ini sangat membantu mahasiswa retaker. Kami pimpinan FK berusaha melakukan pendekatan dengan para dosen Spesialis untuk bisa mendapatkan solusi agar anak anak kita ini bisa lulus sesuai standar yang ada. Bekerjasama dengan pihak rektorat untuk memastikan batas masa studi mahasiswa.
- Ada masa studi mahasiswa yang sudah melebihi sampai dengan 14 tahun tapi belum diberikan surat DO walaupun pada saat forum rektor sudah dibicarakan bahwa harus ada solusi bagi mahasiswa yang sudah melewati batas masa studi, tapi sampai saat ini kami masih tari ulur karena kami berpikir anak anak ini adalah anak asli daerah yang harus kita perjuangkan, sehingga kami mencari cara untuk atasi masalah mereka, karena retensi dokter di wilayah papua sangat kurang sehingga kami sampaikan di forum rektor bahwa tidak mungkin anak anak FK UI yang punya IPK tinggi mau mengabdikan diri di Nduga, Lani jaya, Deyai apalagi dengan situasi keamanan yang sulit dijamin. Jadi sumbangsi kita adalah dengan berusaha membantu anak anak kita ini, sehingga pada bulan Februari tahun 2025 ini ada 43 mahasiswa yang lulus UKMPPD.

- Terdapat kerjasama antara provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan dengan FK Uncen yaitu tahun 2023 Provinsi Papua Pegunungan mengirimkan 21 mahasiswa, tahun 2024 11 mahasiswa dan Papua Selatan tahun 2025 akan mengirimkan 10 mahasiswa yang berasal dari 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan
- Untuk mahasiswa retaker sudah banyak kebijakan yang kami usahakan bahkan kami cari mereka jika tidak hadir dalam progsus maupun UKMPPD
- Batas pendaftaran Renim pada tanggal 18 April karena deadline 1 minggu karena ada tuntutan dari mahasiswa kalau tidak akan di palang, dan proses Renim juga berjenjang, dari fakultas di usulkan ke rektorat kemudian rektorat ke dirjen.
- Try out berbayar sudah dilaksanakan selama 10 tahun dan sebenarnya tidak ada masalah. Dan biaya itu pun resmi yang di stor ke pusat untuk membiayai operasional kegiatan yang sudah di hitung sesuai dengan kebutuhan keseluruhan try out
- Dalam 1 tahun ada 4 periode ujian yaitu Februari, Mei, Agustus dan November
- Biaya UKT sebesar 20 juta selama 4 semester dengan SK Rektor untuk selama perkuliahan, kalau saat ini Renim berbayar karena untuk mengaktifkan NIM yaang akan di urus, dengan VA . Yang terjadi adalah mahasiswa tetap menjalankan perkuliahan tanpa membayar biaya UKT
- Setiap kali Fakultas mengirimkan dokter muda ke RS Dok 2 Fakultas harus membayar sekitar 1 M lebih, sehingga menjadi beban fakultas. Sejak tahun 2019 pemerintah daerah sudah tidak lagi memberikan dukungan dana kepada FK. Dana yang dialokasikan untuk biaya profesi diambil dari dana sarjana kedokteran
- Kebijakan terkait batas pembayaran Renim tanggal 18 April 2024 sebaiknya menyurat ke pihak rektorat, karena apabila terkait keuangan fakultas tidak bisa memberikan solusi dan tanggal 18 diberikan karena desakan dari mahasiswa.
- Kabar baik saat ini bahwa beberapa mahasiswa yang awalnya tidak bisa ikut ujian pada bulan Mei tapi bisa diberikan kesempatan ujian
- Sampai saat ini ada 11 dosen yang keluar dari FK Uncen karena gaji PNS tanpa tunjangan, mohon di bantu dari BP3OKP untuk kesejahteraan tenaga dosen. Saat ini FK Uncen buka formasi 10 untuk tenaga dosen tapi hanya 1 yang mendaftar jadi dosen.

dr. Katrin : Kordinator Ujian Nasional

- Try out AIKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) dilakukan 4x dalam setahun, dilakukan uji coba untuk mahasiswa, dan try out bulan April telah diberikan bulan maret 2025, yang surat edarannya sudah diberikan kepada mahasiswa yang akan ikut UKMPPD, besarnya 428.000. UKMPPD CBT 500.000 dan OSCE 750.000.

- Rata rata mahasiswa yang UKMPPD sudah tidak akan ikuti OSCE sehingga sudah tidak membayar OSCE, yang di bayar hanya CBT sebesar 500.000

dr. Jeferson SpOG (Pembantu Dekan I) :

- Ada kebiasaan dari mahasiswa yaitu jika mereka bingung di satu stase mereka tidak berkonsultasi dengan dosen pembimbing tapi malah berhenti di stase, tidak lanjut stase dan pulang kampung kemudian nanti sudah 1 tahun baru balik lagi sehingga masa studi mereka menjadi lebih panjang dan hal ini nanti akan kami ketahui setelah mereka balik melapor
- Saat ini dibuat kebijakan baru di kurikulum ini yang sedang kami kebangkan yaitu buat stase persemester, sehingga bisa di monitor keberadaan mahasiswa. Ketika sudah 2 semester berturut turut tidak memberikan informasi akan diberikan sanksi.

dr Ishak SpKJ (Pembantu Dekan III) :

- Permasalahan yang ada di mahasiswa ini bisa dilihat dari pola asuh yang salah. Sementara kita harus berusaha mendidik anak anak kita ini sehingga bisa menjadi dokter yang baik yang tidak salah mengobati masyarakat kita sehingga Saya menyarankan ada pembinaan mental pada anak anak mahasiswa
- Monitoring kepada mahasiswa secara berkala
- Sinergi dalam pemberdayaan mahasiswa yang nanti akan menjadi dokter
- Harapan kami FK Uncen menjadi barometer bagi kesehatan di tanah papua

Anggota BPP : Bpk Yoseph Yolmen

- Badan Pengarah dibentuk karena di anggap penting dan perlu untuk percepatan pembangunan di Papua yang berlandaskan UU No 2 Tahun 2021 dan Perpres No 121 tahun 2022. Anggota BPP dilantik pada tanggal 29 Mei tahun 2023 dengan SK Presiden, dibantu oleh 4 pokja yaitu Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Polhukam atau Papua Damai. Anggota BPP terdiri 9 yaitu dari kementerian : mendagri, memkeu, bapenas dan 6 anggota BPP dari 6 DOB
- BPP hadir di masing masing provinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami adalah untuk mengawal dengan fungsi utama yaitu Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi tentang penggunaan dana atas pelaksanaan otsus yaitu dana otsus, DAU dan DAK. Yang kami awasi ibaratnya sebuah rumah yang besar yang punya kamar masing masing yang memiliki pengasan yaitu DPRK, Inspektorat dan kementerian terkait dan BP3OKP ibaratnya yang mengawal dan mengawasi apa yang ada di dalam bangunan yang ada. Oleh karena itu kami BP3OKP sangat senang bisa berkoordinasi dan

kolaborasi dengan teman teman akademisi yang adalah orang orang yang profesional untuk membangun papua kedepan.

- BP3OKP mampu berbicara bukan hanya di daerah tapi juga di nasional, oleh sebab itu jika ada kendala dari bapak ibu bisa kami bantu karena pimpinan kita adalah bapak wakil presiden, dimana setiap bulan kita menyampaikan laporan ke bapak wakil presiden
- Pada kesempatan ini kami mau mendapatkan informasi dan penjelasan dari ibu dekan dan juga seluruh pimpinan FK terkait kendala yang di hadapi adik adik mahasiswa OAP untuk bisa kita fasilitasi kepada para gubernur setanah papua, Kita membutuhkan nakes untuk melayani saudara saudara kita di seluruh wilayah papua, beberapa pendekatan sudah kami lakukan di kementerian kesehatan untuk mencari solusi kekurangan nakes di papua dan kompensasi untuk nakes.
- Banyak hal yang sudah kami 6 anggota BPP dan 6 Gubernur bicarakan di nabire pada rakor BPP dan 6 Gubernur se tanah papua untuk kami sampaikan kepada bapak presiden
- Jika kedepan ada masalah masalah yang ada jangan di tanggung sendiri tapi bisa menyurat ke BP3OKP sehingga kami bisa membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, mari bersinergi dengan transparansi. Kalau daerah tidak bisa selesai bisa di bawa ke pusat karena kita masih berada dibawah wakil presiden
- Ada catatan penting yang harus di sepakati bersama dan menjadi suatu keharusan yaitu perlakuan terhadap anak anak FK harus untuk yang masuk FK Uncen harus dipersiapkan sedini mungkin, dari SMA kelas 1, yang saat ini akan di kembangkan pendidikan berpola asrama
- Mohon diberikan toleransi waktu bagi mahasiswa dalam pengurusan renim
- BPP harus mendapatkan data resmi dari fakultas sehingga bisa clear berapa biaya yang harus di bayar

Anggota Pokja Papua Sehat :

- Kebutuhan tenaga kesehatan di papua sangat besar sehingga anak anak kita yang mengalami permasalahan harus dibantu sehingga mereka bisa diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tanah papua
- Tujuan dilaksanakan pertemuan adalah untuk mendengar dua arah permasalahan apa yang di hadapi oleh mahasiswa yang terancam DO

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

1. Biaya Renim di usulkan kepada bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk di bantu pembayarannya
2. Masing-masing mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dengan mengajukan proposal kolektif per DOB. Pihak BP3OKP akan membantu fasilitasi kepada pemerintah daerah masing masing DOB melalui OPD terkait

3. Dibuat group untuk setiap DOB dalam pembinaan mahasiswa sehingga bisa follow up perkembangan mahasiswa sampai menjadi dokter
4. Mekanismenya yang akan diusulkan adalah pemda yang akan membayar langsung kepada pihak rektorat atau yang akan disesuaikan dengan regulasi
5. Untuk Persiapan UKMPPD akan coba dibicarakan dengan pihak Fakultas apakah ada kebijakan atau program khusus yang bisa membantu adik adik mahasiswa
6. BP3OKP bersurat kepihak rektorat Uncen terkait kebijakan perpanjangan waktu pembayaran Renim jika masih berproses di pemerintah daerah kepada BP3OKP dan kemudian ditindaklanjuti oleh BP3OKP

#### **D. Dokumentasi Kegiatan**



Dokumentasi Audiensi bersama Kadispora Provinsi Papua Selatan



Dokumentasi Kegiatan Audiensi BP3OKP bersama dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih



Dokumentasi Kegiatan Audiensi BP3OKP bersama dengan Dekan dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih

## ANGGOTA BP3OKP

### **A. AUDIENSI BP3OKP BERSAMA DENGAN DIRJEN SDA – 24 PRIL 2025**

**1. Diskusi Alokasi Dana APBN untuk Perbaikan Sistem Drainase di Provinsi Papua Selatan, yang meliputi Empat Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.**

Tanggapan Ibu Dirjen SDA bersama seluruh Tim Alokasikan Dana APBN sudah diakomodir didalam proposal pengusulan dari Kepala Balai Sumber Daya Air Provinsi Papua Selatan, dan sudah diberikan penguatan dari Pimpinan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan sehingga pekerjaan-pekerjaan itu akan difokuskan penyelesaiannya dengan menggunakan Dana APBN untuk empat Kabupaten sesuai dengan program prioritas dari masing-masing kepala Daerah.

**2. Pembangunan Tembok Penyangga Abrasi di Pantai Lampu Satu**

Tanggapan Ibu Dirjen SDA bersama seluruh Tim akan fokus untuk alokasikan Dana APBN untuk penyelesaian pembuatan Tembok penyangga Abrasi yang terjadi di Pantai Lampu Satu sepanjang 5 KM dan Pekerjaannya sudah difokuskan akan segera di kerjakan sesuai dengan Tahun Anggaran berjalan. Harapan dari Ibu Dirjen bersama dengan Pimpinan di Dirjen SDA akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan Abrasi dengan baik agar Masyarakat bisa hidup lebih aman dan nyaman. Selain itu akan didatangkan Adivisor dari Belanda untuk membantu menangani Abrasi Pantai Lampu Satu hingga Ndalir, termasuk Pantai Wendu hingga Kali Kumbe.

**3. Perbaikan dan Pembinaan Sistem Irigasi Petani**

Tanggapan Ibu Dirjen SDA bersama seluruh Tim akan fokus untuk alokasikan Dana APBN untuk penyelesaian pembinaan Sistem Irigasi petani, sistem Drainase Kota, dan pembuatan 5 Pintu Air yang ada akan dikelola secara digital, dan termasuk pembuatan pintu-pintu Air baru sesuai kebutuhan untuk Kabupaten Merauke termasuk kabupaten yang lain sesuai kebutuhan prioritas dari Pemerintah Daerah setempat. Untuk Kabupaten Merauke sudah dibagi tugas untuk pekerjaan normalisasi Drainase mulai dari Primer akan dikerjakan oleh pihak SDA-BWS, Sekunder akan dikerjakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Tertier akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten.

Pekerjaan Drainase dan irigasi persawaan akan dikerjakan oleh Balai SDA-BWS sesuai fokus Pekerjaan untuk PSN di Provinsi Papua Selatan. Jalan Tani juga terakomodir didalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Inspres No. 2 Tahun 2025 tentang PSN.

**4. Penggerukan Kali Maro.**

Tanggapan Ibu Dirjen SDA bersama seluruh Tim akan fokus untuk alokasikan Dana APBN untuk penggerukan dan Normalisasi Kali Maro supaya tidak terjadi Pendangkalan badan Sungai karena akan menghambat angkutan transportasi laut dan juga pekerjaan ini sudah menjadi Pekerjaan prioritas dari Kementerian PUPR, termasuk perbaikan jalan-jalan yang rusak di Provinsi Papua Selatan, baik status jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Kabupaten.

## **B. MENGHADIRI PERTEMUAN DENGAN KPK GIZ – 30 APRIL 2025 KOLABORASI KPK-GIZ DORONG PENGUATAN PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS: WUJUDKAN PAPUA SEHAT, CERDAS, DAN PRODUKTIF**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) terus mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana otsus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan lokal.

Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/4) bersama Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan kementerian/lembaga terkait, Kepala Satgas Korsup Wilayah V, Dian Patria, menegaskan bahwa otsus bukan sekadar instrumen anggaran, melainkan wujud komitmen negara untuk merealisasikan tiga visi utama dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Oleh karena itu, pemanfaatan dana Otsus yang selaras dengan RIPPP harus dikawal secara serius dan bebas dari penyimpangan.

“Dana OTSUS harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai tujuan utamanya, bukan dijadikan ruang kepentingan pribadi atau kelompok. Jika telah diberi perlakuan khusus, maka pengelolaannya juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas khusus. Afirmasi itu penting, tapi tetap dalam koridor hukum. Semua pihak perlu menerjemahkan kebijakan ini secara kontekstual agar masyarakat Papua benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Dian.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, kebijakan ini mengusung empat cita-cita utama, 1) meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur; 2) menegakkan keadilan, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, dan demokrasi; 3) mengakui dan menghormati hak-hak dasar masyarakat Papua, sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas; 4) mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, berprinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Namun, selama Otsus Jilid I (2002–2021), meskipun pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp138,65 triliun (termasuk Dana Tambahan Infrastruktur), dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dinilai belum signifikan. Sehingga memasuki Otsus Jilid II melalui RIPPP, pengawasan dan tata kelola keuangan daerah menjadi perhatian utama KPK.

“Papua tidak bisa dipotret dengan kaca mata Jawa. Kita harus pastikan dana ini tidak kembali menguap seperti dua dekade lalu. Papua punya mimpi sendiri. Dana otsus bukan hanya angka, tapi harapan. Tidak bisa lagi pakai pola lama dengan solusi *business as usual*,” lanjut Dian.

Dian juga menambahkan bahwa kegiatan ini semata untuk mencari terobosan bagi Papua yang lebih baik, dengan kembali mengingat hakikat kehadiran UU Otsus dan berani terbuka terhadap kritik. “Semoga kita semakin dekat dengan formula terbaik untuk menjadikan Papua yang lebih adil dan sejahtera bagi rakyat kini dan yang akan datang,” ucapnya.

### **Perlu Pembentukan Tata Kelola Otsus**

Pada kesempatan yang sama Advisor GIZ, Metta Yanti, menjelaskan bahwa sejak Februari 2025, timnya telah melakukan kajian terhadap pengelolaan Dana OTSUS—mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan—dan pengadaan barang/jasa (PBJ) di Papua. Hasilnya, ditemukan sejumlah persoalan utama dalam pengelolaan dana Otsus, di antaranya:

- Perencanaan dan penganggaran otsus belum konsisten, minim data dukung.
- Sistem kementerian belum terintegrasi, timbul duplikasi dan data tidak sinkron.
- Pemda belum adaptif terhadap semangat Otsus Jilid II, peran provinsi masih belum jelas.
- Salur dana lambat dan SPJ kolektif menghambat serapan.
- Pengawasan dan pelaporan belum digital dan terintegrasi, terutama di daerah baru.
- Laporan tahunan otsus masih administratif, belum berbasis hasil dan dampak.

Lantas, kajian PBJ dari dana otsus turut diwarnai dengan sejumlah kendala serius, mulai dari perencanaan yang tidak sesuai standar biaya, keterlambatan penyaluran dana, rendahnya penggunaan sistem *e-procurement*, hingga kurangnya *tagging* dana otsus dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Diskresi dan penunjukan langsung terhadap penyedia masyarakat Papua sering dilakukan tanpa standar yang jelas, sementara banyak proyek mangkrak, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak selesai.

Selain itu, praktik “pinjam bendera” dan permintaan “uang palang” juga masih terjadi. Minimnya pelaporan berbasis *outcome*, lemahnya sistem pengawasan, serta belum terintegrasinya data antar-organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghambat akuntabilitas. Dalam banyak kasus, kekhususan masyarakat Papua disalahgunakan untuk menolak regulasi formal, seperti penggunaan sistem daring, sehingga pengawasan dan evaluasi menjadi tidak efektif.

“Melihat temuan ini, kami mendorong transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat penting agar dana otsus benar-benar tepat sasaran,” ujar Metta.

Sementara, Dian menambahkan pada bagian pembentukan penganggaran perlu dimulai dari indikator kinerja otsus, bukan sekadar teknis anggaran. “Misalnya, jika indikatornya adalah kualitas layanan kesehatan, maka yang perlu didorong adalah percepatan tenaga medis, rumah sakit pendidikan, serta layanan ibu dan anak. Bukan hanya sekadar serapan anggaran,” tegas Dian.

### **Pandangan BP3OKP: Harmonisasi Harus Jadi Prioritas**

Anggota BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, menekankan pentingnya harmonisasi antara pusat dan daerah. “Jangan sampai Otsus Jilid II bernasib sama dengan OTSUS Jilid I. Kita harus duduk bersama menyelaraskan perencanaan dan pengawasan.

Otto Ihalauw, anggota BP3OKP dari Papua Barat Daya, juga menyatakan bahwa meskipun BP3OKP baru terbentuk pada 2023, komitmen terhadap keberhasilan Otsus tetap tinggi. Sementara itu, Irene Manibuy, anggota BP3OKP dari Papua Barat, menyoroti pentingnya transparansi.

“Agar tidak transparan, semua kegiatan harus diberikan label agar jelas dan mudah diawasi.

### **Rekomendasi KPK: Transformasi Tata Kelola Otsus**

Sebagai bagian dari diskusi bersama, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola dana Otsus Papua:

- Labelisasi khusus dalam PBJ, agar mudah ditelusuri dan diawasi.
- *Probitiy audit* untuk proyek strategis, guna menghindari konflik kepentingan.
- Integrasi sistem pelaporan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) - Sistem Informasi Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan (SIPPP), agar keuangan dan kinerja bisa dimonitor secara *real-time*.
- Validasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tanpa diskriminasi berbasis identitas.
- Skema pelaksanaan pengadaan *multiyears* dengan kontrol ketat agar pembangunan tidak tersendat.
- Peningkatan kapasitas SDM lokal, melalui pelatihan dan pemagangan sejak dini.
- Revisi Perpres No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, guna memperkuat afirmasi berbasis merit.
- Replikasi praktik baik antar-daerah, agar keberhasilan tidak bersifat parsial.

KPK juga mendorong langkah-langkah konkret lanjutan, antara lain melalui sinkronisasi regulasi Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Khusus, dan lainnya; simplifikasi prosedur termasuk memangkas tahapan dan syarat administrasi yang tidak efektif; kebijakan terobosan seperti fokus kegiatan berdasarkan indikator, tidak harus semua berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)/masyarakat asli Papua jika tidak efisien, kemungkinan pengadaan terpusat, dan penyesuaian skema Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); serta evaluasi komparatif pada pendekatan *stick and carrot* untuk mendorong kepatuhan dan kinerja.

Lebih lanjut, KPK juga mendorong agar hasil kajian bersama GIZ ini dapat dibawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Dengan kolaborasi yang kuat, sinergi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan dana Otsus Jilid II benar-benar menjadi tonggak perubahan nyata menuju Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan dari Sekretariat Negara, sebagai penanggung jawab BP3OKP; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian PPN/Bappenas; serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

### C. DOKUMENTASI



**Dokumentasi Audiensi BP3OKP Bersama Dengan Tim Sekretriati Wakil Presiden bertujuan untuk perekrutan kekosongan calon anggota Pokja pada BPP di wilayah Papua**



**Penyerahan Dokumen Calon Anggota Pokja BPP Papua Selatan Kepada Tim Sekretariat Wakil Presiden RI**



**Dokumentasi Audiensi dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR RI**



**Dokumentasi Pertemuan Dengan KPK GIZ, Kolaborasi KPK-GIZ Dorong Penguatan Pengawasan Dana Otonomi Khusus: Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif**

Laporan Bulan April BP3OKP Provinsi Papua Selatan, dibuat guna menginventarisir aktivitas pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan program kerja yang direncanakan yang merujuk pada Perpres No.24 tahun 2023, dengan tugas melaksanakan SHEK dan fungsi sesuai penjabaran tugas perbidang sesuai dengan Keputusan Ketua BPP No 1 Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program selanjutnya, untuk mensukseskan pencapaian visi, misi dan strategi OTSUS Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari yang diharapkan dan juga jauh dari sempurna. Demikian laporan kami ini dibuat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 14 Mei 2025  
Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.SI, MRSC  
NIP: 999920240117145257